

## Runtuhnya *Global Governance*: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)

Yusa Djuyandi \*, , Shafa Ghaisani Salsabila Brahmantika , dan  
Bima Riandy Tarigan 

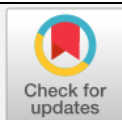
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Padjadjaran, 45363, Jatinangor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

\* Korespondensi: [yusa.djuyandi@unpad.ac.id](mailto:yusa.djuyandi@unpad.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### Info Publikasi:

Studi Pustaka



#### Sitasi Cantuman:

Djuyandi, Y., Brahmantika, S. G. S., & Tarigan, B. R. (2021). *The Collapse of Global Governance: When the U.S. Leaves the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*. *Society*, 9(2), 504-521.

DOI: [10.33019/society.v9i2.304](https://doi.org/10.33019/society.v9i2.304)

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)

Dikirim: 30 Januari, 2021;

Diterima: 29 Juni, 2021;

Dipublikasi: 31 Desember, 2021;

### ABSTRAK

*Global governance* meliputi kegiatan politik dunia dan pengelolaan isu dan fenomena yang terjadi pada suatu negara kebangsaan, yang melibatkan kontribusi dari lingkungan regional hingga internasional. Di bidang keamanan global, banyak upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk melawan ancaman eksternal yang dapat menyebabkan destabilisasi. Non-proliferasi dan perkembangan nuklir untuk perdamaian adalah isu-isu yang menjadi perhatian pertahanan-keamanan global. Upaya pengendalian dan penjaminan penggunaan nuklir dilakukan melalui penetapan hukum internasional, resolusi, dan kesepakatan multilateral. *The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)* adalah salah satunya. Mempengaruhi keamanan, politik, dan ekonomi dunia, keberadaan JCPOA mulai terganggu sejak mundurnya Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu pihak yang awalnya menandatangani perjanjian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Runtuhnya *Global Governance*: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis berdasarkan data sekunder, divalidasi dengan teknik triangulasi dalam penelitian kualitatif ini. Prosedur analitis menggunakan data sekunder yang diambil dari jurnal, media, dan literatur terkait perjanjian nuklir Iran dan analisis sebelumnya yang membahas keluarnya AS dari perjanjian JCPOA. Teknik analisis dilakukan dengan menyusun urutan data, mengorganisasikan data ke dalam suatu pola, kategori, dan deskripsi dasar. Penelitian ini menemukan bahwa *global governance* memiliki kelemahan mendasar dalam penerapannya. Melalui analisis keluarnya AS dari perjanjian nuklir Iran, dapat dikatakan bahwa kendali kendali berada di

tangan AS. Kebijakan pemerintahan Trump mengatasnamakan AS keluar dari JCPOA untuk menggagalkan pencapaian global governance dan secara signifikan mempengaruhi tatanan ekonomi, politik, dan keamanan multi-nasional. Implementasi global governance dan permasalahannya juga diangkat berdasarkan kepentingan negara adidaya.

**Kata Kunci:** Amerika Serikat; Global Governance; JCPOA; Non-Proliferasi; Nuklir

## 1. Pendahuluan

Mengembangkan kekuatan melalui instrumen pendukung militer dan keamanan, termasuk memiliki kekuatan melalui energi nuklir, adalah pencarian dan tujuan banyak negara. Namun, untuk menghindari pengembangan dan penggunaan bahan bakar nuklir untuk senjata atau pemusnah massal yang karena faktor destruktifnya sangat tinggi, sistem internasional kemudian membentuk suatu perjanjian yang disebut Treaty on Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), yang telah berlaku sejak tanggal 5 Maret 1970. Perjanjian ini bertujuan untuk membatasi kepemilikan senjata nuklir, yaitu dalam hal komitmen perlucutan senjata nuklir, non-proliferasi, dan hak untuk menggunakan bahan bakar nuklir untuk tujuan damai (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Pengembangan nuklir Iran dimulai pada 1950-an, ketika para pemimpin Iran menerima bantuan teknis di bawah program AS, Atoms for Peace, yang memproduksi reaktor nuklir pertamanya pada November 1967 (Nuclear Threat Initiative, 2020). Kemudian pada tahun 1958, Iran menjadi anggota International Atomic Energy Agency (IAEA) dan ikut menandatangani Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) pada tahun 1970. Namun, Revolusi Iran 1979 dan penyerangan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran menyebabkan hubungan menjadi tidak cukup baik antara Iran dan negara-negara Barat dan berdampak pada penghentian proyek nuklir Iran, yang baru dilanjutkan pada tahun 2002 (Arms Control Association, 2020).

Terlepas dari eskalasi perselisihan antara negara-negara Barat dengan Iran, sistem internasional telah menghasilkan beberapa resolusi dan sanksi bagi Iran, seperti yang dijatuhkan oleh AS, Dewan Keamanan PBB, dan Uni Eropa (Mardani & Hooshmand, 2016, p. 70). Pada bulan Juni 2006, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Cina, Rusia, dan Jerman sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB plus Jerman, yang kemudian disebut sebagai P5+1 bersama dengan Uni Eropa, mulai mengusulkan perjanjian kerangka kerja dengan Iran untuk menghentikan program pengadaan bahan bakar nuklirnya. Namun karena kurang mendapat tanggapan positif, pada Desember 2006, Dewan Keamanan PBB secara aklamasi mengadopsi Resolusi 1737 yang menjatuhkan sanksi kepada Iran dengan melarang negara-negara di dunia melakukan transaksi teknologi nuklir dan rudal ke Iran serta membekukan beberapa aset di Iran.

Serangkaian negosiasi panjang terkait aktivitas nuklir di Iran akhirnya ditutup pada Juli 2015, ketika Iran dan negara-negara P5+1 menyepakati Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) – kesepakatan yang berjangka waktu 15 tahun dan membatasi kapasitas pengembangan senjata nuklir Iran. Timbal baliknya, Iran akan dikenakan keringanan bahkan pencabutan sanksi ekonomi terkait program nuklir Iran dari negara-negara P5+1. Perjanjian ini telah diratifikasi oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB pada tanggal 20 Juli 2015,

ditandai dengan dikeluarkannya Resolusi 2231, yang berarti Iran diwajibkan untuk mematuhi ketentuan dalam JCPOA, yang kemudian akan diverifikasi oleh IAEA.

JCPOA sering menjadi tolak ukur keberhasilan hubungan multilateral dalam anarkisme sistem internasional, khususnya di bidang non-proliferasi nuklir, untuk mengurangi konflik dalam skala global ([Arms Control Association, 2020](#)). Di sisi lain, Kawasan Timur Tengah memandang bahwa perjanjian JCPOA akan melegitimasi program nuklir Iran dan selanjutnya melegitimasi pengaruh dan kekuasaan Iran di kawasan. Demikian pula di dalam negeri AS, sebagai salah satu negara yang berpengaruh dalam mencapai kesepakatan, tampaknya ada fragmentasi pandangan – Partai Demokrat, yang mayoritas mendukung pemerintahan Obama, telah menyetujui JCPOA. Sebaliknya, sebagian besar Partai Republik mengkritik dan menolaknya ([Arms Control Association, 2020](#)).

Salah satu politisi Partai Republik yang berulang kali mengkritiknya adalah Donald Trump. Sejak menjadi calon presiden AS pada tahun 2016 telah menyatakan bahwa ia akan menyelidiki kesepakatan terburuk yang pernah ada (*worst deal ever*) dan telah berjanji untuk meninggalkan JCPOA jika ia terpilih sebagai Presiden AS ([Lorber, 2016](#); [Jovan, 2021](#)). Trump, yang akhirnya terpilih pada November 2016 sebagai Presiden AS ke-45, bersikeras mengkampanyekan bahwa JCPOA adalah kesepakatan terburuk yang pernah ada dan menginginkan negosiasi ulang, yaitu melalui penerapan kembali semua sanksi yang telah dilonggarkan di JCPOA. Namun, sekutu di pihak Eropa di P5+1 menunjukkan penolakan mereka terhadap upaya negosiasi ulang JCPOA. Bahkan sekutu Amerika Serikat di Eropa mengeluhkan bahwa AS tidak berhak menarik diri dari JCPOA ([Arms Control Association, 2020](#); [Jovan, 2021](#); [Schwammenthal, 2018](#)).

Jika berdasarkan laporan pemantauan IAEA terhadap Iran yang tetap pada jalurnya untuk mematuhi implementasi JCPOA ([Arms Control Association, 2020](#)), di sisi lain, Iran kerap menuai kontroversi dari sejumlah aktivitas pengembangan rudal balistiknya. Hingga tepat 18 bulan masa jabatan Trump atau pada 8 Mei 2018, AS menarik diri secara sepihak dari perjanjian JCPOA. Tindakan ini dijustifikasi oleh klaim AS yang menganggap bahwa Iran telah mendukung gerakan terorisme dan pengembangan rudal balistik ([Nuclear Threat Initiative, 2020](#)), yang sering menyebabkan destabilisasi di kawasan Timur Tengah dengan memicu konflik, teror, dan kekacauan ([Paramasatya & Wiranto, 2019, p. 300](#)).

Sikap dan kebijakan unilateralisme pemerintahan AS pada masa kepemimpinan Trump yang menarik diri dari perjanjian JCPOA dinilai telah mempengaruhi bidang politik, ekonomi, dan keamanan internasional berbasis *global governance*. Secara politis, kebijakan Trump untuk menarik AS dari JCPOA bertentangan dengan kebijakan Presiden sebelumnya, Barack Obama. Selain itu, kebijakan Trump dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan yang diprakarsai oleh sekutu Amerika Serikat, seperti Jerman, Prancis, dan Inggris. Ketiga negara tersebut bahkan kecewa dengan keputusan Trump ([Ratnasari, 2018](#)). Bagi sekutu AS, keluarnya AS dari JCPOA menyebabkan kurangnya kontrol efektif yang memadai terhadap Iran, terutama yang terkait dengan kekuatan politik Iran di Kawasan Timur Tengah, di mana Iran dianggap terlibat dalam berbagai konflik di kawasan ([Paramasatya & Wiranto, 2019](#)). Dari perspektif keamanan internasional, mantan Presiden AS Barack Obama juga mengatakan bahwa tanpa JCPOA, AS akan kalah dari Iran yang bersenjata nuklir atau perang lain di Timur Tengah ([Ratnasari, 2018](#)).

Penelitian ini akan fokus menganalisis Runtuhnya *Global Governance*: Saat Keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Kajian terkait *global governance* dapat dilihat dari sosiologi sejarahnya yang muncul dari pendekatan Gramscian dan Weberian. Konsep tersebut saat ini diwakili oleh pandangan menonjol yang dikemukakan oleh Murphy, di mana *global governance* adalah studi tentang peran organisasi internasional mengenai evolusi kapitalisme ([Hewson, 1996](#)). *Global governance* juga terkait dengan sosiologi politik, yang

menunjukkan globalisasi dan politik kontemporer terkait dengan masalah budaya, struktur sosial, dan aksi sosial demokratis (Nash, 2010). Salah satu hal yang digambarkan dari *global governance* adalah adanya suatu tatanan dunia (*world order*), yang akan menimbulkan pertanyaan baru tentang politik pemerintahan global? Apa yang bisa kita harapkan dari mereka? Apa agenda mereka? (Muller, 2005).

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1. Kepemerintahan Global

Kepemerintahan global, atau yang dikenal dengan *global governance* adalah studi yang relatif baru dalam studi politik dan hubungan internasional. Eksistensi *global governance* terlihat seiring dengan globalisasi. Itu juga merupakan bagian dari globalisasi itu sendiri, baik dari segi ekonomi, politik, sistem hubungan internasional, hingga model interaksi masyarakat global dalam hal kepentingan tertentu yang dilakukan oleh lembaga negara dan aktor non-negara.

*Global governance* berbeda dengan *good governance*. *Global governance* mengatur tanpa otoritas berdaulat dan hubungan yang melampaui batas-batas nasional. *Global governance* melakukan secara internasional apa yang dilakukan pemerintah di negaranya (domestik) (Finkelstein, 1995). *Global governance* juga dipandang sebagai upaya atau cara untuk memecahkan masalah sosial dan politik yang melebihi kemampuan negara untuk menanganinya secara mandiri sehingga dapat diselesaikan secara tertib dan dapat diandalkan (Weiss & Gordenker, 1996).

*Governance* dan *government* juga memiliki perbedaan mendasar untuk memahami konsep-konsep utama dalam *global governance*. *Government* dapat bekerja dalam keadaan legitimasi yang lemah, sedangkan *governance* hanya dapat berjalan jika mayoritas menerima kehadirannya (Rosenau & Czempiel, 1992).

Intinya, *global governance* adalah pemerintahan tanpa pemerintahan yang disebut "*governance without government*" (Rosenau & Czempiel, 1992). Isu-isu yang tidak dapat ditangani oleh negara secara mandiri membutuhkan lebih dari satu pihak, baik negara maupun organisasi internasional (non-negara), untuk menangani isu-isu bersama berdasarkan kepentingan bersama (Commission on Global Governance, 2020).

Dari definisi-definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *global governance* atau aktor-aktor pemerintahan global dibagi menjadi aktor negara dan non-negara. Aktor-aktor ini termasuk organisasi antar pemerintah, *International Organization* (IGO), *civil society representatives* atau perwakilan masyarakat madani, pelaku ekonomi dan keuangan internasional, negara, dan kelompok informal (Francois, 2009).

### 2.2. Polarisasi Global

Polarisasi dalam sistem internasional muncul karena kepentingan masing-masing negara, baik politik, ekonomi maupun keamanan, yang mengutamakan negaranya. Setiap negara akan berusaha meningkatkan kekuatan politik, ekonomi, dan keamanannya untuk bertahan dalam sistem internasional. Setiap negara tidak akan pernah menyerah ketika melihat keunggulan negara lain sehingga akan terjadi persaingan dalam meningkatkan kekuatan tersebut. Di bidang keamanan, hal ini akan menimbulkan dilema keamanan dimana setiap negara yang merasa terancam akan memperkuat keamanannya. Sebaliknya, ini akan menjadi sumber ancaman baru bagi negara lain (Herz, 2003). Pada akhirnya, ini menyebabkan polarisasi negara-negara penguasa.

Secara konseptual, polaritas global merupakan bentuk hubungan antar negara di dunia yang didasarkan pada kekuatan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat internasional. Polarisasi ini mencerminkan jumlah negara yang bersaing untuk kekuatan global. Kekuatan



yang menjadi kriteria negara-negara tersebut biasanya kekuatan ekonomi dan kekuatan militer mereka. Ada tiga bentuk umum polaritas: bipolar, multipolar, dan unipolar.

Bipolar dapat diartikan sebagai situasi dimana kekuatan global berada di tangan dua negara yang sama kuatnya, seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet, pada masa perang dingin. Kemudian multipolar adalah ketika lebih dari dua negara sama-sama kuat dalam memperebutkan kekuatan global seperti negara-negara Eropa sebelum Perang Dunia I. Dan yang terakhir adalah unipolar, dimana hanya ada satu negara yang berkuasa dalam tatanan global, atau hanya ada satu negara adidaya seperti hari ini (pasca-Perang Dingin) di mana AS adalah satu-satunya negara adidaya (Haas, 1970).

Terkait fenomena *global governance* dengan keluarnya AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), menunjukkan kecenderungan bahwa polarisasi global dalam *global governance* dilihat dari adanya bentuk polarisasi unipolar. Dengan itu, AS ingin memposisikan diri sebagai penguasa atau pihak yang berkuasa dalam tatanan global dengan menciptakan tatanan dunia yang menurutnya ideal.

### 2.3. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan salah satu poin penting dalam perumusan atau pengambilan kebijakan dan keputusan, serta sikap terhadap hubungan internasional. Menurut Charles Beard, kepentingan nasional adalah dasar atau alasan suatu negara (*raison d'état*) yang terkandung dalam tujuan dan ambisi suatu negara dalam berperan dalam hubungan internasional (Burchill, 2005). Selain itu, menurut Theodore Coulombis dan James Wolfe, sebagaimana dikutip dalam Bakry (2017), kepentingan nasional akan selalu menjadi poin penting dalam membuat prediksi dan resolusi terkait dengan perilaku internasional.

Kepentingan nasional terdiri dari empat motivasi, yaitu individu, organisasi, ideologi, dan strategi (Oppenheim, 1987). Individu biasanya adalah pemimpin negara yang kemudian membentuk organisasi yang memiliki kepentingan yang sama. Kemudian dari para pemimpin dan organisasi tersebut, akan tercipta sebuah ideologi yang dianggap cocok untuk negara, seperti liberalisme atau komunisme. Pada akhirnya, dari individu (pemimpin), organisasi, dan ideologi negara, strategi yang baik akan diluncurkan untuk mencapai kepentingan nasionalnya.

Kepentingan nasional juga memiliki empat dimensi: ekonomi, keamanan, kepentingan internasional, dan ideologi (Neuchterlein, 1976). Kepentingan nasional akan didasarkan pada empat dimensi berikut: kepentingan untuk memenuhi perekonomian negara, melindungi warga negaranya dari dalam dan luar negeri, menjalin hubungan yang baik dan menguntungkan dengan negara lain dan masyarakat internasional, serta menerapkan dan mempertahankan ideologi negara.

Kepentingan nasional akan terbentuk melalui motivasi dan dimensi tersebut, namun setiap negara harus memilih prioritas kepentingan nasionalnya dari sekian banyak kepentingan nasional (Clinton, 1986). Mengacu pada beberapa konsep tersebut, setiap negara akan berusaha untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan nasionalnya ditengah kecenderungan *global governance*. Hal ini untuk meminimalkan pengurangan signifikan peran dan keberadaan negara dalam penyelenggaraan hubungan internasional.

### 3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggali dan membahas tentang kegagalan sistem *global governance* dalam perjanjian nuklir Iran atau yang dikenal dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Dalam studi kualitatif ini, prosedur analitis menggunakan data sekunder yang diambil dari jurnal, media, dan literatur terkait perjanjian

nuklir Iran dan analisis sebelumnya yang membahas keluarnya Amerika Serikat dari perjanjian JCPOA. Berdasarkan penelusuran data sekunder, terdapat beberapa informasi mengenai latar belakang atau motif dan dampak keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA, yang juga berimplikasi pada runtuhnya *global governance* yang dibangun sebelum pemerintahan Trump.

Selanjutnya, penelitian kualitatif ini bersifat non-interaktif, yaitu tidak mengumpulkan data dari interaksi langsung dengan manusia sebagai sumber data, melainkan mengumpulkan data dan mengidentifikasi serta menganalisis data secara subjektif untuk mensintesis data melalui sumber data sekunder tersebut. Kemudian, dalam penelitian kualitatif non-interaktif ini, kami menggunakan analisis konseptual, historis, dan kebijakan. Berbagai data yang telah terkumpul kemudian divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber, setelah itu data yang telah disaring digunakan sebagai bahan untuk proses analisis. Teknik analisis dilakukan dengan menyusun urutan data, mengorganisasikan data ke dalam pola, kategori, dan deskripsi dasar. Dalam proses ini, data disederhanakan agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan untuk menggali informasi yang lebih luas, detail, dan mendalam.

#### **4. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### **4.1. Latar Belakang Amerika Serikat Keluar dari JCPOA**

Trump mengumumkan penarikan AS dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) atau perjanjian nuklir Iran pada Selasa, 8 Mei 2018, di Gedung Putih, Washington, D.C. Dengan mundurnya AS, Trump juga mengumumkan akan memberlakukan kembali sanksi pada sektor minyak Iran, yang telah dicabut sebagai bagian dari perjanjian. Dalam pidatonya, Trump mengatakan, “kita tidak dapat mencegah bom nuklir Iran di bawah struktur yang lapuk dari perjanjian saat ini” (Yasinta, 2018). Dalam membenarkan keputusannya, Trump mengungkapkan, “saya mengumumkan hari ini bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran” (BBC News, 2019).

Penarikan AS melalui Trump tidak lepas dari kepentingan nasional AS dan ambisi Trump. Dalam laporan The Commission on America's National Interests yang berjudul “*America's National Interest*”, Amerika Serikat memiliki lima kepentingan nasional yang vital, yaitu mencegah ancaman serangan senjata biologi, kimia, dan nuklir terhadap AS dan kekuatan militernya di luar negeri, menjamin kelangsungan hidup sekutu AS dalam membentuk sistem internasional yang kooperatif, menjamin stabilitas sistem global, mencegah konflik antar negara besar di perbatasan AS, dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang dapat menjadi musuh strategis AS, seperti Rusia dan China (Belfer Center for Science and International Affairs, 2000).

Wajar jika AS memainkan peran yang sangat penting dan mencampuri urusan pengembangan nuklir Iran dengan kepentingan nasional AS. AS telah lama mencurigai Iran mengembangkan senjata nuklir untuk pembunuhan massal. Namun, Iran membantahnya dan mengatakan bahwa mereka mengembangkan teknologi nuklir hanya untuk menjamin keamanan dan perdamaian dan tidak digunakan sebagai senjata pembunuhan massal (Schwammenthal, 2018; Mousavian & Mousavian, 2018).

Perkembangan teknologi nuklir di Iran telah berlangsung cukup lama, dimulai pada tahun 1956. AS menjadi salah satu mitra Iran dalam mengembangkan teknologi nuklir. Namun, kerja sama ini kandas sejak Revolusi Islam Iran pada 1979. Meski kerja sama dengan AS berakhir, pengembangan teknologi nuklir di Iran terus berlanjut. Hal ini membuat AS khawatir, sehingga berusaha menekan Iran untuk tidak melanjutkan proyek nuklirnya. AS telah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Iran dan membuat sektor ekonomi Iran mengalami penurunan. Meski begitu, politik dan pemerintahan Iran tetap kuat sehingga pengembangan teknologi nuklir Iran

tetap berjalan. Oleh karena itu, AS dan negara-negara P5+1 mengadakan perjanjian dengan Iran pada tahun 2015 yang disebut The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Namun, pada 2018, Donald Trump memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian itu secara sepihak.

Trump telah secara aktif mengangkat masalah ini sejak masa kampanyenya. Trump menilai kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA merupakan kesalahan terburuk AS. Dalam kampanyenya, Trump berjanji untuk memperbaiki perjanjian JCPOA atau meninggalkan perjanjian (Lorber, 2016), dan pada akhirnya, ketika Trump terpilih sebagai Presiden AS, ia membuktikannya dengan meninggalkan perjanjian ini pada 2018 karena Iran menolak persyaratan yang diberikan oleh Trump. Keteguhan dan pemikiran kuat Trump untuk menolak kesepakatan JCPOA dibuktikan dengan pemecatannya terhadap Menteri Luar Negeri Rex Tillerson yang dinilai berbeda pandangan dengan Trump terkait isu nuklir Iran. Posisi ini digantikan oleh direktur Central Intelligence Agency (CIA), Mike Pompeo, yang mengemukakan keras kesepakatan nuklir Iran. Trump juga memecat Penasihat Keamanan Nasional AS McMaster dan beberapa pejabat lainnya karena perbedaan pandangan tentang masalah ini (McLaughlin, 2018).

Menurut Schwammenthal (2018) dan Simon (2018), ada tiga faktor utama penarikan AS dari perjanjian JCPOA oleh Trump, yaitu:

- 1) Mencegah Iran, yang dianggap sebagai pemasok utama negara-negara teror, dari pengayaan senjata nuklir dan uranium. (Kontra-terorisme telah menjadi kebijakan luar negeri reguler dalam agenda keamanan nasional AS sejak serangan teroris 9/11).
- 2) Memberikan sanksi ekonomi tingkat tinggi kepada Iran dan negara-negara yang membantu Iran dalam pengembangan nuklirnya.
- 3) Mempertimbangkan pengembalian miliaran dolar aset Iran yang dibekukan.

Selain tiga hal di atas, Amerika Serikat memiliki prinsip dan landasan politik luar negeri yang telah lama dipegangnya: menegakkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan memberantas terorisme. Sehingga hal ini juga yang menjadi poin utama keluarnya AS dari perjanjian JCPOA karena Iran dianggap sebagai sponsor utama kegiatan terorisme di Timur Tengah. Kepentingan nasional AS lainnya yang diperoleh dari penarikan diri dari perjanjian JCPOA adalah hubungan bilateral dengan Israel dan Arab Saudi. Israel dan Arab Saudi termasuk di antara negara-negara yang ingin perjanjian JCPOA dibatalkan, berharap ada lebih banyak tekanan pada Iran untuk menghentikan kegiatan nuklirnya. Apalagi, Trump telah berjanji kepada Israel untuk menghentikan program pengembangan nuklir Iran. Keinginan Israel agar AS keluar dari JCPOA terlihat dari pernyataan Benjamin Netanyahu pada pertemuan American Israel Public Affair Committee (AIPAC) yang memaparkan bahaya nuklir Iran berdasarkan dokumen Iran yang dicuri oleh intelijen Israel (Nuclear Threat Initiative, 2020).

Selain itu, Trump ingin menunjukkan sikap politiknya dengan menarik diri dari perjanjian nuklir Iran. Mundur dari JCPOA telah menjadi janji Trump sejak masa kampanye. Kesadaran ini menunjukkan bahwa Trump adalah politisi yang menepati janjinya, tidak seperti pemimpin lain yang hanya bisa memberikan janji kampanye kosong. Penarikan AS dari perjanjian JCPOA juga didasarkan pada gagasan Trump tentang *"Make America Great Again"*. Menurut Trump, perjanjian ini telah merugikan Amerika dan menguntungkan Iran. Trump menganggap ini setara dengan AS membantu Iran dalam mengembangkan senjata nuklir.

Dengan mundurnya AS dari perjanjian JCPOA, setidaknya ada lima keuntungan bagi kepentingan nasional AS, yaitu: mencegah penguatan ekonomi Iran; melemahnya hegemoni Iran di Timur Tengah; mencegah pengembangan rudal balistik Iran; menjaga hubungan baik

dengan Arab Saudi dan Israel; dan mencitrakan Trump sebagai pemimpin yang menepati janjinya.

Pada intinya, AS memiliki dua kepentingan nasional terkait pengembangan nuklir Iran, yaitu kepentingan pertahanan dan kepentingan ketertiban dunia. Namun, di bawah kepemimpinan Trump memiliki ambisi yang lebih ekstrim untuk membasmi rezim Iran.

## **4.2. Dampak Keluarnya AS dari JCPOA**

Dengan keluarnya AS dari perjanjian nuklir Iran atau JCPOA, tentunya akan memberikan berbagai dampak baik bagi AS, negara-negara yang mengikat JCPOA, bahkan internasional. Setidaknya tiga sektor utama terpengaruh: politik, ekonomi, dan keamanan.

### **4.2.1. Bidang Politik**

Dari segi politik, khususnya AS, dampak yang paling mungkin terjadi adalah AS akan memiliki citra buruk di mata para pendukung perjanjian JCPOA dan organisasi internasional (non-negara). Mereka yang mendukung perjanjian ini termasuk PBB dan IAEA. Selain itu, hubungan politik dan diplomatik antara AS dan Iran akan memburuk. Hal yang lebih buruk mungkin terjadi, dimana masyarakat internasional, baik organisasi negara maupun non-negara, akan berpikir dua kali untuk berkolaborasi atau membuat kesepakatan dengan AS. Sejarah mencatat bahwa AS telah meninggalkan perjanjian JCPOA secara sepihak. Namun, kemungkinan ini sangat kecil karena posisi AS sebagai negara adidaya yang tentunya memiliki kekuatan yang kuat.

Wilayah Timur Tengah mungkin akan merasakan dampak politiknya. Timur Tengah adalah tempat Iran, Israel, dan Arab Saudi berada. Dengan keluarnya AS dari JCPOA dan penerapan kembali sanksi terhadap Iran, ketegangan geopolitik akan muncul di Timur Tengah.

Untuk politik internasional, keluarnya AS dari JCPOA akan mengakibatkan ketegangan, menciptakan dua kubu antar negara di dunia, yaitu negara-negara yang mengkritik AS karena secara sepihak keluar dari perjanjian nuklir Iran dan juga negara-negara yang mendukung AS. membuat negara-negara yang memiliki hubungan bilateral dan multilateral dengan Iran waspada dan mengambil langkah politik yang tidak pasti karena ada dua pertimbangan, yakni ketakutan akan sanksi AS dan memburuknya hubungan dengan Iran.

Politik internasional juga akan semakin terpusat, dengan AS sebagai pusatnya. Sebagian besar masalah global, termasuk JCPOA, didorong oleh AS sebagai poros utama. Hal ini menyebabkan hegemoni AS di dunia internasional semakin signifikan karena sistem politik dan ekonomi dunia menjadi unipolar. Pada saat yang sama, *global governance* diperkirakan akan memecah unipolar dengan isu-isu kepentingan bersama yang multipolar dan gagal dengan dibuktikan oleh keluarnya AS secara sepihak dari JCPOA.

### **4.2.2. Ekonomi Iran dan Dunia**

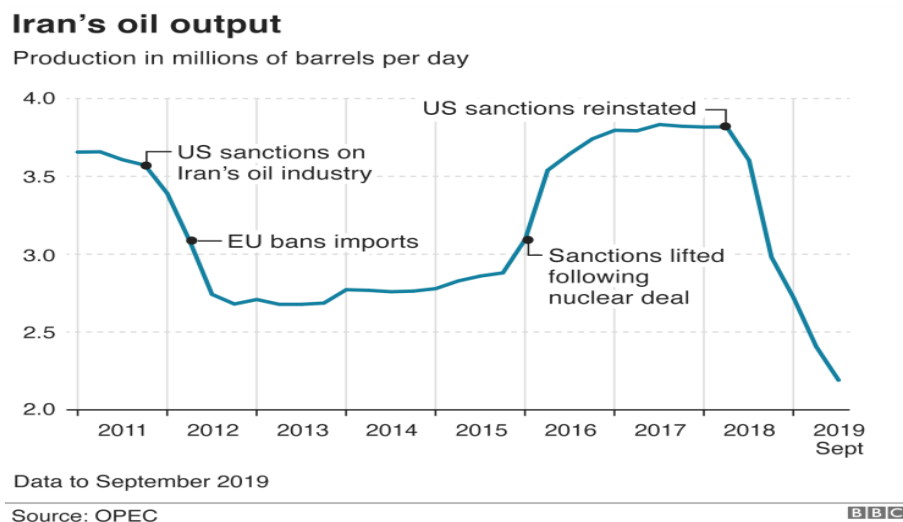
Setelah penandatanganan perjanjian JCPOA, perekonomian Iran terlihat cukup baik karena pelonggaran sanksi yang diterapkan. Bagi Iran, sumber daya berupa minyak merupakan komoditas utama untuk ekspor – yang sebelum JCPOA, ekspor minyak Iran sempat menurun, namun bisa membaik pada 2016, setelah kesepakatan JCPOA.

Menurut data OPEC yang dilansir BBC News, Iran sempat mengalami puncak produksi minyaknya sebesar 3,8 juta barel per hari dan mengekspor 2,3 juta barel per hari. Setelah AS keluar dari JCPOA, terlihat bahwa sejak pertengahan tahun 2018, produksi dan ekspor minyak Iran mengalami penurunan yang signifikan dan terus menerus hingga tahun 2019 (BBC News, 2019) ke angka produksi 1.705.400 barel per hari, dengan permintaan minyak 1.837.800 barel



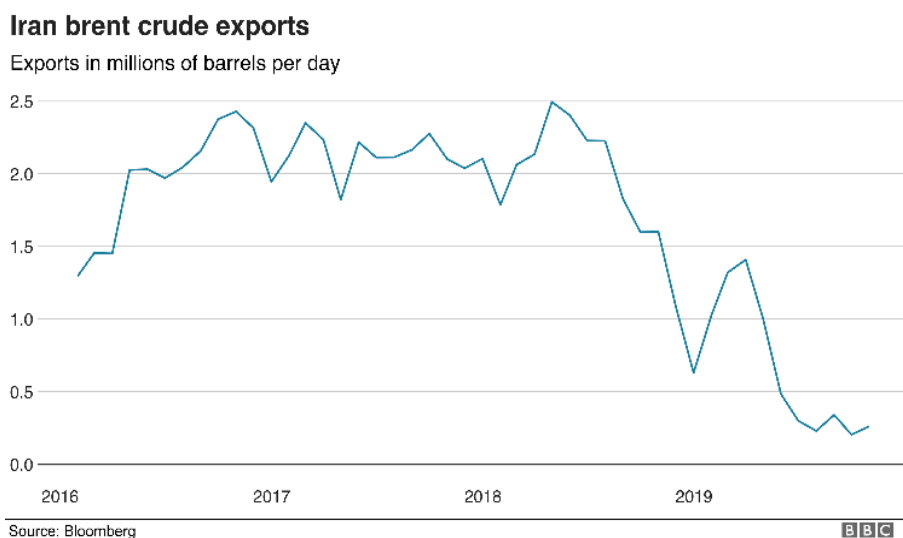
per hari, dan ekspor 651.100 barel per hari (OPEC, 2020). Pada April 2019, ekspor minyak Iran turun rata-rata satu juta barel per hari dan mempengaruhi pendapatan pemerintah Iran yang berkurang miliaran dolar. Dua bulan kemudian, Trump menginginkan tekanan maksimum pada Iran dan menyatakan “berniat membuat ekspor minyak Iran menjadi nol” – pada Oktober 2019, penurunan ekspor minyak Iran bahkan lebih signifikan menjadi 260.000 barel per hari.

Data lain dari TankerTrackers, yang melacak pengiriman dan penyimpanan minyak, mengatakan ekspor minyak Iran telah turun lebih dari 2,5 juta barel per hari sejak AS keluar dari JCPOA. Namun, Iran sudah mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan eksportnya pada Agustus 2020, meskipun bervariasi antara 300.000-750.000 barel per hari, dan pada September 2020, bervariasi antara 400.000-1.500.000 barel per hari – menunjukkan bahwa masih sulit untuk melacaknya. pengiriman ekspor minyak Iran. Kesulitan pelacakan ini juga karena Iran berhenti memasok produk ke Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) sejak sanksi AS kembali dijatuhkan (Sharafedin & Lawler, 2020). Data dari TankerTracker sendiri belum bisa dipastikan kebenarannya, mengingat pelacakan kapal-kapal pengapalan ekspor minyak dari Iran tidak bisa terdeteksi. Belum ada konfirmasi resmi terkait produksi dan ekspor minyak Iran pada 2020.



**Gambar 1. Produksi minyak Iran 2011-2019**

Sumber: OPEC, sebagaimana dikutip dalam BBC News (2019)



**Gambar 2. Ekspor Minyak Iran 2015-2019**

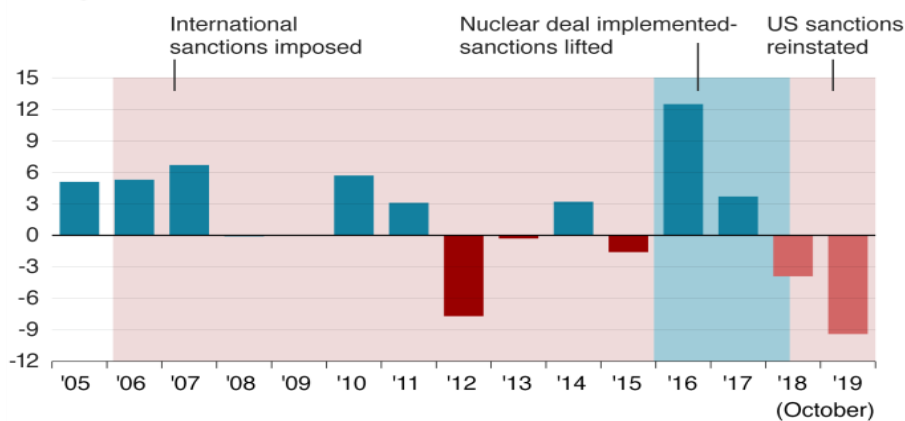
Sumber: Bloomberg, sebagaimana dikutip dalam BBC News (2019)

Sebagai akibat dari keputusan pemerintahan Trump untuk keluar dari perjanjian JCPOA dan memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran, perusahaan-perusahaan Amerika yang memiliki hubungan dengan Iran harus mengakhiri kontrak mereka dalam waktu 180 hari sejak keputusan Amerika Serikat untuk tidak lagi terikat oleh JCPOA, sebagaimana serta pengenaan sanksi sekunder terhadap Bank Sentral Iran yang diberlakukan oleh Departemen Keuangan AS (BBC News, 2017).

Dampaknya bagi Iran sendiri adalah produksi dan ekspor komoditas minyak mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Iran. Menurut laporan Bank Dunia, Iran mengalami percepatan resesi dan inflasi sepanjang 2019-2020, mengingat ketatnya sanksi AS, ditambah dampak pandemi COVID-19. Hal itu teridentifikasi dari semakin melemahnya pertumbuhan PDB, menyusutnya lapangan kerja (24,3 juta) pekerja pada 2019 turun menjadi 1,5 juta pekerja pada 2020, kenaikan harga produksi dalam negeri, hingga depresiasi rial Iran terhadap dolar AS (BBC News, 2019; World Bank, 2020).

### Economic growth in Iran

GDP growth rate %



Source: Central Bank of Iran, IMF

BBC

**Gambar 3. Pertumbuhan ekonomi Iran (2005-2019)**

Sumber: Bank Sentral Iran dan IMF, sebagaimana dikutip dalam BBC News (2019)

### Iran's currency has hit record lows recently

Number of Iranian rials to one US dollar at unofficial market rate



Source: Bonbast.com

BBC

**Gambar 4. Kurs Rial Iran terhadap Dolar Amerika Serikat (2017-2019)**

Sumber: Bonbast sebagaimana dikutip dalam BBC News (2019)

Pandangan lain menyatakan bahwa ekonomi AS tidak mempengaruhi perekonomian Iran karena perdagangan yang kurang intens antara Iran dan AS setelah 1979. Kondisi ekonomi Iran tidak begitu banyak dipengaruhi oleh sektor bisnis AS (Palamar, 2018). Namun, dampak ekonomi yang signifikan adalah ketika AS memberlakukan kebijakan sanksi ekstrateritorial, salah satunya bagi perusahaan asing dari negara mana pun yang berbisnis dengan Iran (Palamar, 2018). Sanksi tersebut berupa transaksi lembaga keuangan asing dengan bank sentral atau lembaga keuangan di Iran (sanksi dikenakan setelah 180 hari istirahat sejak AS keluar dari JCPOA). Atau bisa juga dalam bentuk penjualan, suplai, dan transfer langsung atau tidak langsung ke atau dari Iran di pasar grafit, logam, aluminium, baja, batu bara, hingga minyak (The U.S. Department of Treasury, 2018).

Iran sangat terlibat dalam pasar atau ekonomi global, mengingat minyak bumi merupakan komoditas ekspor terbesar Iran. Hingga 2018, Iran diketahui masih mengekspor ke negara-negara berikut.

**Tabel 1. Negara importir Minyak Iran dalam satuan ribu barel per hari**

| Negara/Tahun  | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------|------|------|------|
| China         | 540  | 625  | 625  |
| India         | 220  | 460  | 470  |
| Jepang        | 170  | 225  | 170  |
| Korea Selatan | 115  | 280  | 360  |
| Turki         | 110  | 140  | 245  |
| Eropa         | -    | 245  | 470  |

Sumber: Aslan (2018, p. 14)

Keterkaitan negara-negara lain dalam pasokan energi ini mungkin menguntungkan Iran dalam beberapa tahun terakhir sebelum pengenaan kembali sanksi AS. Akibat sanksi ekonomi, Iran juga mengalami penurunan produksi minyak. Tampaknya harus menghadapi masalah ekonomi yang mempengaruhi pasar global karena pasar ekspornya sangat terbatas. Dalam analisis Aslan (2018) juga disimpulkan bahwa sanksi AS telah menyebabkan perusahaan global dan perusahaan skala besar 'terikat', tidak ada investasi langsung di Iran, dan semakin mendalamnya masalah sosial ekonomi di Iran (Aslan, 2018, p. 21). Keterbatasan pasar ekspor Iran juga akan mempengaruhi kebutuhan impor minyak dari negara-negara yang biasanya menjadi mitra dagang Iran.

Sanksi ekstrateritorial AS juga tampaknya menyebabkan hubungan Trans-Atlantik terombang-ambing. Negara-negara seperti Prancis dan Jerman ditekan untuk mundur. Pemerintahan Trump fokus ketika Amerika Serikat menarik JCPOA terkait dengan ekonomi dan keamanan global. Ini termasuk niat untuk mencegah rezim Iran mensponsori terorisme, memperkaya uranium, dan mencapai ambang ledakan nuklir, juga, menjatuhkan sanksi ekonomi tingkat tertinggi terhadap Iran dan negara mana pun yang membantu Iran mengembangkan senjata nuklir atau melakukan bisnis di Iran (Cherkaoui, 2010, p. 3).

Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Marie, menanggapi dengan mengeluh bahwa sanksi AS membuat AS terlihat seperti "economic policeman of the planet", sejalan dengan pendapat E.U. Perwakilan Tinggi/Wakil Presiden Federica Mogherini mengkritik sanksi AS dan menyatakan bahwa JCPOA adalah puncak dari 12 tahun diplomasi, dan (JCPOA) dimiliki oleh seluruh komunitas internasional (Cherkaoui, 2010, p. 4).

Dalam hal ini, sedikit banyak, kebijakan AS telah banyak berkontribusi pada tatanan ekonomi dan kondisi perdagangan global, terutama ekonomi nasional Iran, yang kemudian termasuk dalam hubungan perdagangan Iran dengan berbagai negara di dunia.

#### **4.2.3. Keamanan Regional dan Global**

JCPOA seringkali menjadi tolak ukur keberhasilan hubungan multilateral dalam anarkisme sistem internasional, khususnya di bidang non-proliferasi nuklir, untuk meredam konflik dalam skala global ([Arms Control Association, 2020](#)). Di sisi lain, kawasan Timur Tengah memandang bahwa kesepakatan JCPOA akan melegitimasi program nuklir Iran dan selanjutnya melegitimasi pengaruh dan kekuasaan Iran di kawasan.

Sejak awal keluarnya AS dari perjanjian JCPOA, Presiden Iran Hassan Rouhani telah bereaksi. Dia menyesali kurangnya komitmen AS terhadap perjanjian tersebut. Dia menyatakan bahwa dia telah meminta Organisasi Energi Atom Iran untuk memulai pengadaan uranium untuk program nuklirnya jika perjanjian JCPOA tidak lagi menawarkan manfaat apa pun ([Cunningham & Sabbagh, 2018](#)). JCPOA dapat memberikan keuntungan atau risiko: moderasi Iran dan membantu meningkatkan stabilitas kawasan Timur Tengah, atau bahkan dapat menyebabkan destabilisasi karena kemungkinan meningkatnya persaingan antara Iran, Arab Saudi, dan Israel. JCPOA dapat memperkuat norma non-proliferasi di seluruh dunia atau menghasilkan perlombaan untuk meningkatkan kemampuan keamanan antara negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk menandingi Iran ([Goldenberg et al., 2015, p. 5](#)).

Indikasi destabilisasi kawasan pasca penarikan AS dari JCPOA mulai muncul, salah satunya adalah kembalinya Iran dengan pendekatan dan strategi militer yang alot. Menurut analisis [Behravesht \(2018\)](#), Iran telah muncul sebagai strategi regional yang kuat, dilihat sebagai upaya untuk beradaptasi dengan lingkungan internasional ([Behravesht, 2018](#)). Diketahui dari Mike Pompeo, selaku Menteri Luar Negeri AS, Iran diketahui melancarkan serangan yang terjadi di dekat pelabuhan ekspor Fujairah di pantai Uni Emirat Arab dan di seberang Selat Hormuz. Iran secara singkat membantah klaim AS yang menyalahkan serangan terhadap Iran dan meminta bukti. Hal ini menimbulkan ketegangan mengingat Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz pada Juli 2018 jika AS memblokir ekspor minyaknya ([Tempo, 2018](#)).

Selanjutnya, pada 14 September 2019, dilaporkan serangan *drone* dan rudal jelajah melumpuhkan fasilitas Saudi Arabian Oil Company (Aramco) di Abqaiq, Arab Saudi ([Arms Control Association, 2020](#)). Pemerintahan Trump tampaknya langsung menunjuk Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab atas serangan ke Aramco, setelah intelijen AS menemukan bahwa Iran terlibat dalam serangan itu – seperti halnya klaim Arab Saudi melalui pejabatnya bahwa Iran menyerang infrastruktur minyak Saudi pada 14 September 2019. Pada 23 September 2019, beberapa hari kemudian, Inggris, Prancis, dan Jerman juga merilis pernyataan mengutuk serangan 14 September oleh Iran terhadap fasilitas minyak Saudi di Aramco ([Arms Control Association, 2020](#)).

Menurut Ahmadian, seorang peneliti di Belfer Center for Science and International Affairs, kebijakan Trump ingin mengisolasi Iran dan menempatkannya di bawah sorotan sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional untuk menyingkirkan Teheran dari manfaat yang mungkin diperoleh dari JCPOA ([Belfer Center for Science and International Affairs, 2018](#)).

Di bidang keamanan, dampak keluarnya AS dari perjanjian JCPOA telah menimbulkan ketegangan dalam hubungan AS dengan Iran, yang selanjutnya mempengaruhi reaksi Iran dengan “pertunjukan” pertahanannya dan berdampak pada stabilitas kawasan Timur Tengah.



Stabilitas keamanan Timur Tengah sendiri cukup penting di sini dalam sistem internasional, mengingat Timur Tengah merupakan jalur perdagangan dunia yang strategis.

Seperti Teluk Selat Hormuz, misalnya, yang merupakan jalur yang dilalui kapal tanker minyak sekitar 17,2 juta barel per hari atau seperenam dari pasokan minyak global yang diekspor negara-negara anggota OPEC: Iran, Arab Saudi, Irak, Amerika Serikat, Emirates, Kuwait, dan Qatar (Wulan, 2020), ke berbagai negara di dunia. Mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi sebelumnya, signifikansi Iran di kawasan strategis ini perlu dipertimbangkan, termasuk bagaimana ketegangan antara AS dan Iran akan mempengaruhi perdagangan internasional, yang membutuhkan stabilitas keamanan di kawasan ini.

#### **4.3. Global Governance dalam JCPOA Pasca Keluarnya AS**

Tak lama setelah AS menarik diri dari perjanjian JCPOA, ada beberapa catatan dari aktor internasional lainnya dalam menanggapi aksi sepihak AS ini. Prancis, Britania Raya, dan Jerman telah mengeluarkan pernyataan bersama untuk terus mendukung kesepakatan JCPOA, mengingat pentingnya upaya non-proliferasi. Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui laman Twitter bahwa Prancis, Jerman, dan Inggris menyesali keputusan AS untuk meninggalkan JCPOA. Meskipun rezim non-proliferasi nuklir adalah prioritas – dan *tweet* Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris, menyatakan komitmen Inggris untuk JCPOA untuk tetap kuat dan bekerja dengan semua pihak lain yang terlibat untuk terus mempertahankannya. Dalam sebuah wawancara, Perdana Menteri Prancis Jean-Yves Le Drian juga menyatakan bahwa perjanjian (JCPOA) belum berakhir.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, yang secara konsisten menekankan bahwa JCPOA adalah pencapaian besar dalam non-proliferasi, diplomasi nuklir, dan kontribusi bagi perdamaian dan keamanan regional-internasional, “sangat prihatin” dan meminta semua pihak untuk menjaga kesepakatan (United Nations, 2018). Sementara itu, Menteri Luar Negeri Rusia juga menegaskan kembali dukungannya terhadap JCPOA, dan menanggapi tindakan AS dapat merusak kepercayaan lingkungan internasional kepada IAEA (Reuters, 2018). Mengenai IAEA, diplomat Uni Eropa kemudian mengatakan bahwa Uni Eropa akan tetap berkomitmen untuk melanjutkan implementasi penuh dan efektif dari perjanjian nuklir ini (JCPOA) dan mempercayai kinerja, kompetensi, dan otonomi IAEA, yang terus-menerus melaporkan implementasi perjanjian. Demikian juga, Rusia dan China berkomitmen untuk menjaga kesepakatan JCPOA.

Kepala IAEA, Yukiya Amano, menyatakan tidak ada indikasi pelanggaran. Iran masih mematuhi perjanjian tersebut, mengingat inspektur IAEA masih diberikan akses ke semua situs dan situs pengembangan nuklir Iran – dan jika JCPOA gagal, itu akan merugikan verifikasi nuklir dan multilateralisme (United Nations, 2018).

Negara-negara lain yang tidak terikat dalam perjanjian JCPOA, seperti Australia dan Jepang, melalui Perdana Menteri Malcolm Bligh Turnbull dan Menteri Luar Negeri Taro Kono, menyayangkan keputusan AS dan berharap negara-negara lain yang terlibat akan terus mempertahankan perjanjian tersebut (Al Jazeera, 2018). Demikian juga melalui juru bicara Presiden Erdogan, Ibrahim Kalin, Turki *mentweet* bahwa keluarnya AS dari JCPOA adalah risiko bagi dunia (lingkungan internasional). Reaksi dan tekanan berlawanan datang dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, yang setuju dengan Israel dalam mendukung keputusan pemerintahan Trump untuk meninggalkan kesepakatan dan menerapkan kembali sanksi ekonomi terhadap Iran (Al Jazeera, 2018).

Keputusan Trump juga ditekan oleh Presiden AS ke-44, Barack Obama, dan Mantan Menteri Luar Negeri AS, John Kerry. Obama menulis pernyataannya bahwa JCPOA adalah

bagian dari kepentingan nasional AS. Selain menahan program nuklir Iran secara signifikan, JCPOA juga merupakan bentuk keberhasilan diplomatik, yang pengawasan dan verifikasi dapat disesuaikan dalam menangani hubungan bilateral antara AS dan Korea Utara (Al Jazeera, 2018). Selain itu, John Kerry juga mengklaim bahwa keputusan pemerintahan Trump merusak keamanan, komitmen, dan risiko AS terhadap Israel, ekstremis Iran, dan kemampuan pemerintahan AS berikutnya untuk merancang perjanjian internasional (Al Jazeera, 2018).

Memang, berdasarkan analisis kebijakan "*After the JCPOA: A Game Plan for the United States*", JCPOA telah mewakili momen bersejarah bagi kebijakan luar negeri AS, yang perjanjian ini belum terlihat signifikansinya karena akan dinilai dari kemampuannya untuk lebih lanjut membantu tujuan dan kepentingan AS dalam mencegah Iran memperoleh senjata nuklir; meningkatkan stabilitas kawasan Timur Tengah; memperkuat rezim non-proliferasi, dan; memperbarui kekuatan atau posisi AS dalam skala global. Untuk menganalisis pengaruh untuk mengejar keberhasilan tujuan AS, itu akan tergantung pada kebijakan AS terhadap perjanjian JCPOA. Jika implementasi perjanjian ini berhasil, kemungkinan akan membuka jalur kerja sama baru dalam menghentikan pengejaran senjata nuklir Iran secara permanen. Namun, jika implementasi ini gagal, JCPOA diproyeksikan akan membuka jalan bagi Iran untuk memiliki senjata nuklir dalam waktu 15 tahun atau bahkan lebih cepat (Goldenberg *et al.*, 2015, p. 5).

Dari analisis yang ditemukan, *global governance* sebagai upaya untuk memecahkan masalah sosial dan politik di luar kemampuan negara untuk mengatasinya dapat diwujudkan dalam senjata nuklir yang tidak dapat diselesaikan secara mandiri, mengingat tingginya risiko dan ancaman yang mungkin muncul. Diperlukan politik dan keamanan yang memadai untuk mengendalikannya.

Upaya sistem internasional untuk menghadapinya muncul dalam kebijakan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menjembatani negara-negara dunia dalam menangani masalah senjata nuklir dengan dikeluarkannya NPT, beberapa resolusi, hingga JCPOA. IAEA juga merupakan lembaga yang memantau dan menilai pengembangan dan penggunaan energi nuklir untuk memastikan bahwa semua kegiatannya mengikuti kesepakatan internasional.

Selain itu, berdasarkan konsep *global governance* yang mempertimbangkan persetujuan mayoritas, tidak berjalan di JCPOA, mengingat sebagian besar pihak, baik yang terlibat langsung dalam perjanjian atau tidak, lebih berharap pada keberlanjutan JCPOA. Penarikan AS juga berimplikasi pada fragmentasi global – di mana secara politik, kebijakan AS mendukung polaritas global, dan AS diprediksi memiliki kekuatan unipolar karena kemampuannya (kemampuan politik melalui kebijakan) dalam mempengaruhi ekonomi global dan sektor keamanan cukup signifikan. .

Terakhir, di sektor keamanan dan dampaknya yang telah dipelajari, menciptakan dilema keamanan. Negara-negara yang terlibat, terutama Iran, terus memperkuat keamanannya dengan langkah-langkah represif, terutama di kawasan Timur Tengah, yang muncul sebagai ancaman bagi negara-negara lain di dunia.

## 5. Kesimpulan

Terlihat bahwa *global governance* memiliki kelemahan mendasar dalam implementasinya. Melalui analisis penarikan AS dari perjanjian nuklir Iran, dapat dikatakan bahwa kendali kepentingan ada di tangan AS. Meskipun mengikuti konsep *global governance*, yaitu "kepentingan bersama", kesepakatan nuklir Iran melibatkan P5 + 1 aktor negara dan organisasi internasional seperti Dewan Keamanan PBB dan IAEA, bahkan dukungan internasional, tetapi ini tidak membuat AS tertekan. Jika tidak sejalan dengan kepentingan nasionalnya, AS dapat

menarik diri secara sepihak. Jika demikian, dapat dikatakan bahwa AS dikatakan sebagai negara yang memiliki kekuatan dan pengaruh. Negara adidaya ini menjadikan negara-negara dan alat organisasi internasional di bawah payung kepentingan bersama, meskipun kepentingan bersama umumnya diambil dari kepentingan nasional mereka.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, runtuhnya *global governance* ketika AS keluar dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) terlihat dari kuatnya kepentingan nasional AS sebagai negara adidaya. Pelaksanaan *global governance* dalam JCPOA juga terkendala oleh tatanan politik dan ekonomi dunia yang terkesan unipolar. Ada satu negara yang menunjukkan kekuatannya dalam tatanan global.

## 6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

## 7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka

- Al Jazeera. (2018, May 9). World leaders react to U.S. withdrawal from Iranian nuclear deal. Hassan Rouhani News | Al Jazeera. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/news/2018/5/9/world-leaders-react-to-us-withdrawal-from-iranian-nuclear-deal>
- Arms Control Association. (2020, September). Timeline of Nuclear Diplomacy With Iran. Retrieved October 28, 2020, from <https://www.armscontrol.org/factsheets/Timeline-of-Nuclear-Diplomacy-With-Iran>
- Aslan, M. (2018). *The Economic Consequences of the US Withdrawal from the Nuclear Deal*. Ankara, Turkey: Center for Iranian Studies in Ankara.
- Bakry, U. S. (2017). *Dasar-dasar Hubungan Internasional*. Depok, Indonesia : Kencana.
- BBC News. (2017, October 13). Iran nuclear deal: Trump's speech in full. *BBC News*. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-41617488>
- BBC News. (2019, December 9). Six charts that show how hard US sanctions have hit Iran. *BBC News*. Retrieved from <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-48119109>
- Behraves, M. (2018, September 24). Iran More Assertive Regionally After Trump Withdrawal From JCPOA. Retrieved from <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/iran-more-assertive-regionally-after-trump-withdrawal-from-jcpoa/>
- Belfer Center for Science and International Affairs. (2000). *America's National Interests: A Report from The Commission on America's National Interests, 2000*. Author. Retrieved from <https://www.belfercenter.org/publication/americas-national-interests-report-commission-americas-national-interests-2000>
- Belfer Center for Science and International Affairs. (2018, May 16). Consequences of the U.S. Withdrawal from the JCPOA. Retrieved October 31, 2020, from <https://www.belfercenter.org/event/consequences-us-withdrawal-jcpoa>
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

- Cherkaoui, M. (2010, May 28). Trump's Withdrawal from the Iran Nuclear Deal: Security or Economics? Retrieved from <https://studies.aljazeera.net/en/reports/2018/05/trumps-withdrawal-iran-nuclear-deal-security-economics-180510123910355.html>
- Clinton, W. D. (1986). The National Interest: Normative Foundations. *The Review of Politics*, 48(4), 495–519. <https://doi.org/10.1017/s0034670500039656>
- Commission on Global Governance. (2020, October 15). Our Global Neighborhood. Retrieved from <https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighborhood/chap1.htm>
- Cunningham, E., & Sabbagh, B. (2018, May 9). Iran to negotiate with Europeans, Russia and China about remaining in nuclear deal. Retrieved October 29, 2020, from [https://www.washingtonpost.com/world/middle-east/iran-prepared-for-all-scenarios-if-trump-nixes-nuclear-deal-officials-say/2018/05/08/531047a0-5241-11e8-a6d4-ca1d035642ce\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/world/middle-east/iran-prepared-for-all-scenarios-if-trump-nixes-nuclear-deal-officials-say/2018/05/08/531047a0-5241-11e8-a6d4-ca1d035642ce_story.html)
- Finkelstein, L. S. (1995). What Is Global Governance? *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*, 1(3), 367–372. <https://doi.org/10.1163/19426720-001-03-90000007>
- Francois, R. (2009, January). *World Governance Index: Why Should World Governance Be Evaluated, and for What Purpose?* Retrieved from Forum for a new World Governance: <http://www.world-governance.org/>
- Goldenberg, I., Rosenberg, E., Golov, A., Heras, N., Maruyama, E., & Hellman, A. (2015). *After the Joint Comprehensive Plan of Action: A Game Plan for the United States*. Washington: Center for a New American Security. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/resrep06378>
- Haas, M. (1970). International Subsystems: Stability and Polarity. *American Political Science Review*, 64(1), 98–123. <https://doi.org/10.2307/1955616>
- Herz, J. H. (2003). The Security Dilemma in International Relations: Background and Present Problems. *International Relations*, 17(4), 411–416. <https://doi.org/10.1177/0047117803174001>
- Hewson, M. (1996). Review: Historical Sociology of Global Governance. *Review of International Political Economy*, 3(1), 186–193.
- Jovan, C. V. (2021). The United States Unilateral Withdrawal from the Restrictions of Iran's Nuclear Program in JCPOA 2015 Under International Law. *Padjadjaran Journal of International Law*, 4(2), 247–264. <https://doi.org/10.23920/pjil.v4i2.414>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019, April 7). *Perlucutan Senjata dan Non-proliferasi Senjata Pemusnah Massal*. Retrieved October 31, 2020, from Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: [https://kemlu.go.id/portal/id/read/90/halaman\\_list\\_lainnya/perlucutan-senjata-dan-non-proliferasi-senjata-pemusnah-massal#:~:text=Traktat%20Nonproliferasi%20Nuklir%20\(NPT\)%20adalah,bahan%20nuklir%20untuk%20tujuan%20damai](https://kemlu.go.id/portal/id/read/90/halaman_list_lainnya/perlucutan-senjata-dan-non-proliferasi-senjata-pemusnah-massal#:~:text=Traktat%20Nonproliferasi%20Nuklir%20(NPT)%20adalah,bahan%20nuklir%20untuk%20tujuan%20damai).
- Lorber, E. B. (2016, August 9). President Trump and the Iran Nuclear Deal. Retrieved from <https://foreignpolicy.com/2016/11/16/president-trump-and-the-iran-nuclear-deal/>
- Mardani, N., & Hooshmand, M. M. (2016). JCPOA; A Dialectical Paradigm of Treaty and Other International Instruments. *Journal of Politics and Law*, 9(3), 70. <https://doi.org/10.5539/jpl.v9n3p70>
- McLaughlin, E. (2018, March 13). Tillerson's support for Iran deal helped get him fired, but Mattis shares his views. *ABC News*. Retrieved from



<https://abcnews.go.com/Politics/tillersons-support-iran-deal-helped-fired-mattis-shares/story?id=53712207>

- Mousavian, S. H., & Mousavian, M. M. (2018). Building on the Iran Nuclear Deal for International Peace and Security. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 1(1), 169–192. <https://doi.org/10.1080/25751654.2017.1420373>
- Müller, P. S. (2005). Politicians of Global Governance. *CONfines Relacion*, 1(1), 51–66. Retrieved from [http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1870-35692005000100003](http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-35692005000100003)
- Nash, K. (2010). *Contemporary Political Sociology: Globalization, Politics and Power*. West Sussex: Wiley-Blackwell.
- Neuchterlein, D. E. (1976). *National Interest and Foreign Policy: A Conceptual Framework for Analysis and Decision Making*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nuclear Threat Initiative. (2020, June 7). Nuclear. Retrieved October 28, 2020, from <https://www.nti.org/area/nuclear/>
- OPEC. (2020). Iran facts and figures. Retrieved October 31, 2020, from [https://opec.org/opec\\_web/en/about\\_us/163.htm](https://opec.org/opec_web/en/about_us/163.htm)
- Oppenheim, F. E. (1987). National Interest, Rationality, and Morality. *Political Theory*, 15(3), 369–389. <https://doi.org/10.1177/0090591787015003006>
- Palamar, S. (2018, May 11). Trump's Iran Policy Will Have Global Economic Consequences. Retrieved November 1, 2020, from <https://www.cigionline.org/articles/trumps-iran-policy-will-have-global-economic-consequences/>
- Paramasatya, S., & Wiranto, S. (2019). Konfrontasi Amerika Serikat dan Iran dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(2), 297. <https://doi.org/10.20473/jhi.v12i2.14047>
- Ratnasari, Y. (2018, May 9). AS Keluar dari Perjanjian Nuklir Iran, Trump: Kesepakatan Itu Fiksi. *tirto.id*. Retrieved from <https://tirto.id/as-keluar-dari-perjanjian-nuklir-iran-trump-kesepakatan-itu-fiksi-cJ7x>
- Reuters. (2018, May 8). Russian foreign ministry says disappointed by Trump's Iran decision. U.S. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/instant-article/idUKKBN1I933R>
- Rosenau, J. N., & Czempiel, E.-O. (1992). *Governance Without Government: Order and Change in World Politics*. Cambridge and New York: Cambridge University Press.
- Schwammenthal, D. (2018). Europe, the US and the Iran deal: The need to resolve transatlantic disagreements. *European View*, 17(2), 218–226. <https://doi.org/10.1177/1781685818808713>
- Sharafedin, B., & Lawler, A. (2020, September 25). Iran's oil exports jump in September defying sanctions: TankerTrackers. U.S. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/us-iran-oil-exports-idUSKCN26G1VA>
- Simon, S. (2018). Iran and President Trump: What Is the Endgame? *Survival*, 60(4), 7–20. <https://doi.org/10.1080/00396338.2018.1494975>
- Tempo. (2018, July 24). Jenderal Iran Siap Tutup Selat Hormuz Sesuai Perintah Rouhani. *Tempo*. Retrieved from <https://dunia.tempo.co/read/1110132/jenderal-iran-siap-tutup-selat-hormuz-sesuai-perintah-rouhani>
- The U.S. Department of Treasury. (2018, June 27). JCPOA Wind-down Frequently Asked Questions. Retrieved from [https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa\\_winddown\\_faqs.pdf](https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/jcpoa_winddown_faqs.pdf)
- United Nations. (2018, May 10). UN chief 'deeply concerned' by US decision to exit Iran nuclear deal. *UN News*. Retrieved from <https://news.un.org/en/story/2018/05/1009172>

- Weiss, T. G., & Gordenker, L. (1996). *Ngos, the Un, and Global Governance*. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
- World Bank. (2020, April 16). Iran's Economic Update - April 2020. Retrieved from <http://pubdocs.worldbank.org/en/946261554825524131/mpo-irn.pdf>
- Wulan. (2020, August 7). Apa Itu Selat Hormuz? (dan Mengapa Perairan Ini Sangat Penting bagi Dunia). Retrieved from <https://www.matamatapolitik.com/belajar-politik-apa-itu-selat-hormuz-dan-mengapa-perairan-ini-sangat-penting-bagi-dunia/>
- Yasinta, V. (2018, May 9). *Trump: AS Keluar dari Perjanjian Nuklir Iran*. Retrieved from <https://www.kompas.com/internasional/read/2018/05/09/07260231/trump-as-keluar-dari-perjanjian-nuklir-iran>

---

### Tentang Penulis

1. **Yusa Djuyandi** memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hubungan Internasional dari Universitas Padjadjaran, Indonesia, pada tahun 2016. Penulis adalah Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.  
E-Mail: [yusa.djuyandi@unpad.ac.id](mailto:yusa.djuyandi@unpad.ac.id)
2. **Shafa Ghaisani Salsabila Brahmantika** adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.  
E-Mail: [shafa17003@mail.unpad.ac.id](mailto:shafa17003@mail.unpad.ac.id)
3. **Bima Riandy Tarigan** adalah Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.  
E-Mail: [bima18003@mail.unpad.ac.id](mailto:bima18003@mail.unpad.ac.id)